

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INSTANSI : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

TUGAS : Merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah; mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal; mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal; mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal; mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam; mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan Infrastruktur dan sosial; mengoordinasikan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi; membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang mendukung Perekonomian	Persentase Peningkatan Investasi	<u>Makna Indikator :</u> Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). <u>Alasan Pemilihan :</u> Realisasi investasi tahunan menggambarkan perkembangan investasi yang ada. <u>Cara Menghitung Indikator :</u> Selisih antara Realisasi Investasi Tahun Berjalan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya dibagi Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya Dikali 100%.	Dinas PM dan PTSP
2.	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan	<u>Makna Indikator :</u> Nilai SAKIP adalah hasil penilaian dari tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menunjukkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah terjadi perbaikan/peningkatan <u>Alasan Pemilihan :</u> Nilai SAKIP adalah salah satu indikator yang menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan	Dinas PM dan PTSP

			dan kinerja Perangkat Daerah yang secara spesifik menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Nilai diperoleh dari evaluasi AKIP yang dilaksanakan evaluator yang merupakan kalkulasi secara terbobot dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	
		Nilai Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan	<u>Makna Indikator :</u> Nilai Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah <u>Alasan Pemilihan :</u> Nilai Kepuasan Masyarakat adalah salah satu indikator yang menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja Perangkat Daerah yang secara spesifik menggambarkan tingkat kepuasan dari sisi penerima layanan terhadap layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Nilai Kepuasan Masyarakat diperoleh dari survei terhadap penerima layanan dengan perhitungan terbobot pada masing-masing komponen layan	Dinas PM dan PTSP

		Jumlah Inovasi yang diterapkan	<u>Makna Indikator :</u> Jumlah Inovasi yang diterapkan adalah jumlah dari banyaknya upaya transformasi hasil kreatif yang memiliki nilai kebaruan dalam peningkatan kinerja perangkat daerah baik dalam pelayanan publik, maupun secara administrasi dan kinerja perangkat daerah secara umum <u>Alasan Pemilihan :</u> Jumlah Inovasi yang diterapkan adalah salah satu indikator yang menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja perangkat daerah yang secara spesifik menggambarkan upaya dari Perangkat Daerah dalam melakukan terobosan dan transformasi yang memiliki nilai kebaruan dalam mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, meningkatkan kemampuan Perangkat Daerah untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Jumlah inovasi yang diterapkan adalah nilai hitung dari jumlah inovasi yang diterapkan pada Perangkat Daerah	Dinas PM dan PTSP
		Nilai Maturitas SPIP	<u>Makna Indikator :</u> Indeks Maturitas SPIP adalah ukuran tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern seperti efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan <u>Alasan Pemilihan :</u> Indeks maturitas SPIP adalah salah satu indikator yang menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan yang secara spesifik	Dinas PM dan PTSP

			menggambarkan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara internal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Kalkulasi terbobot dari komponen efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan	
	Indeks Pelayanan Publik		<u>Makna Indikator :</u> Indeks Pelayanan Publik adalah indeks digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja pelayanan publik di di Perangkat Daerah berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Pelayanan Publik yang dimaksud adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah <u>Alasan Pemilihan :</u> Indeks Pelayanan Publik adalah salah satu indikator yang menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang secara spesifik menunjukkan kualitas layanan yang diberikan oleh perangkat daerah kepada penerima layanan, baik secara langsung ke masyarakat maupun kepada penerima layanan institusional. Indeks ini menjadi gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk menjadi dasar perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Pembobotan dari 6 komponen yaitu Aspek	Dinas PM dan PTSP

			Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi	
--	--	--	--	--

Banjarbaru, Januari 2026

Mengetahui
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H. MUHIDIN

Endri, AP, M.AP
NIP 19750821 199412 1 005